

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Republik Indonesia terus berupaya untuk melakukan perbaikan pengelolaan anggaran pendidikan di Indonesia khususnya pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Salah satu bentuk perbaikan yang dilakukan adalah mewajibkan seluruh sekolah yang menjadi penerima dana BOS untuk melakukan pengelolaan anggaran tersebut melalui sistem pengelolaan berbasis elektronik yang bernama Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) sejak November 2021 (Menteri Dalam Negeri & Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, 2021). Peraturan ini kembali dipertegas melalui surat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah (2022) yang meminta peran aktif Kepala Dinas Pendidikan baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar memastikan satuan pendidikan baik negeri maupun swasta untuk dapat melakukan registrasi pada ARKAS.

Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) merupakan sistem informasi yang ditujukan untuk mengelola manajemen keuangan sekolah, mencakup perencanaan, organisasi, arahan, koordinasi, kontrol, serta pelaporan yang sesuai dengan standar pemerintah (Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah, 2022, hlm. 6). Aplikasi ARKAS bertujuan untuk membantu sekolah dalam menyusun perencanaan dan anggaran secara digital, serta menyederhanakan proses pelaporan dan akuntabilitas penggunaan dana BOS. Melalui fungsi ini, aplikasi ARKAS diharapkan dapat memastikan penggunaan dana dengan cara yang efisien, efektif, dan berkelanjutan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan sekolah.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah (2022), terdapat 31.076 sekolah dari total 217.620 sekolah penerima dana BOS yang belum melakukan registrasi ARKAS. Kondisi ini bisa disebabkan oleh terkendalanya jaringan internet untuk mengunduh aplikasi, maupun belum adanya tenaga yang terlatih untuk mengelola

ARKAS di sekolah. Oleh karena itu, pemerintah terus menggalakkan pelatihan tentang penggunaan ARKAS, agar sekolah-sekolah yang belum menggunakan aplikasi tersebut dapat segera beralih dikarenakan ARKAS merupakan aplikasi tunggal bagi satuan pendidikan untuk perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan dana BOS yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Tim ARKAS Kemendikbudristek, 2022).

Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan adalah pedoman yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek untuk penggunaan dana BOS oleh sekolah-sekolah di Indonesia. Petunjuk teknis ini mengatur berbagai hal terkait pengelolaan dana BOS, antara lain: 1) Tujuan penggunaan dana BOS; 2) Ketentuan umum penggunaan dana BOS; 3) Sumber dan besaran dana BOS; 4) Mekanisme penyaluran dana BOS; 5) Prosedur pengelolaan dana BOS; 6) Pengawasan dan pengendalian penggunaan dana BOS; dan 7) Pertanggungjawaban penggunaan dana BOS (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022).

Dalam petunjuk teknis ini, dijelaskan bahwa dana BOS harus digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah, seperti pembayaran gaji guru dan karyawan, perawatan dan pengembangan sarana dan prasarana sekolah, kegiatan belajar mengajar, dan kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, petunjuk teknis ini juga mengatur bahwa penggunaan dana BOS harus memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan. Petunjuk teknis pengelolaan dana BOS merupakan pedoman yang penting bagi sekolah-sekolah di Indonesia dalam mengelola dana BOS yang mereka terima. Dengan mengikuti petunjuk teknis ini, diharapkan penggunaan dana BOS dapat dilakukan dengan baik dan tepat sasaran, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (2022), menyebutkan bahwa pengelolaan dana BOS harus memenuhi prinsip-prinsip berikut: 1) fleksibel, yaitu sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan; 2) efektif, yaitu upaya pengelolaan yang memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan; 3) efisien, yaitu pengeluaran biaya seminimal mungkin tetapi mempunyai hasil yang optimal; 4) akuntabel, yaitu pengelolaan dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan sesuai aturan

perundang-undangan; dan 5) transparan, yaitu pengelolaan yang bersifat terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan yang sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Untuk memenuhi prinsip-prinsip tersebut, pemerintah mewajibkan semua satuan pendidikan untuk menggunakan ARKAS sebagai alat bantu dalam pengelolaan keuangan yang mereka lakukan.

Penilaian terhadap pemenuhan prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti: 1) fleksibilitas yang dapat dilihat melalui pembelanjaan dana BOS yang sesuai kebutuhan riil sekolah (Kemdikbudristek, 2021); 2) efektivitas dilihat melalui perbandingan antara rencana anggaran yang telah ditetapkan dan rencana anggaran yang terealisasi (Fauziyyah, Mulyani, & Purnamasari, 2018); 3) efisiensi dapat dilihat dari pemberdayaan sumber daya uang sekolah dalam mencapai optimalisasi akses, mutu, relevansi, dan daya saing sekolah (Afrinanda & Mulyati, 2018); dan 4) akuntabel dapat dilihat pelaporan penggunaan dana yang logis dan sesuai dengan aturan undang-undang (Wele, 2022); dan 4) dan transparansi dapat dilihat dari bagaimana keterbukaan sekolah terhadap publikasi penggunaan dana BOS (Sukardi, Saputra, & Djalil, 2019).

Proses pengelolaan dana BOS di sekolah dimulai dari pembuatan Rencana Kerja Sekolah (RKS). RKS adalah sebuah dokumen perencanaan kegiatan dan program kerja yang disusun oleh sekolah untuk memenuhi tujuan pendidikan yang diinginkan (Zahrok, 2020). RKS yang terdiri dari Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) atau Renstra dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) disusun oleh seluruh anggota sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, hingga staf administrasi, dan berfungsi sebagai alat bantu pengambilan keputusan dalam mengatur kegiatan sekolah (Rohmayanti, 2020).

Menurut Direktorat Pembinaan SMA (2010), RKS terdiri dari beberapa komponen penting yang harus diisi oleh seluruh elemen sekolah. Beberapa komponen RKS antara lain:

1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah. RKS harus mencantumkan visi, misi, dan tujuan sekolah yang jelas dan spesifik. Visi adalah gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh sekolah. Misi adalah tindakan konkret yang dilakukan oleh sekolah untuk mencapai visi. Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai oleh sekolah dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

2. Analisis Kebutuhan Sekolah. RKS harus memuat analisis kebutuhan sekolah, baik dari segi sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan kebutuhan siswa. Analisis ini digunakan untuk menentukan prioritas program kerja yang akan dilaksanakan.
3. Program Kerja Sekolah. Program kerja sekolah harus dirumuskan secara terperinci dan spesifik, serta harus terkait dengan tujuan dan analisis kebutuhan sekolah. Program kerja sekolah harus mencakup kegiatan pendidikan, kegiatan pengembangan sumber daya manusia, dan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana sekolah.
4. Anggaran Sekolah. RKS harus memuat anggaran sekolah yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kerja. Anggaran ini harus realistis dan dapat dipertanggungjawabkan, serta harus mencakup sumber dana dan alokasi dana untuk masing-masing program kerja.
5. Evaluasi dan Monitoring. RKS harus mencakup evaluasi dan monitoring program kerja yang telah dilaksanakan. Evaluasi dan monitoring ini dilakukan untuk mengetahui apakah program kerja sudah sesuai dengan tujuan sekolah dan apakah program kerja tersebut berhasil mencapai target yang diinginkan.

Pada proses penyusunan RKS, partisipasi aktif dan konsisten dari seluruh elemen sekolah dalam proses perencanaan menjadi faktor krusial. Tujuan utama dari keterlibatan ini adalah untuk menghasilkan kesepakatan dan komitmen bersama dalam mencapai sasaran pendidikan yang diharapkan. Selain itu, evaluasi berkala terhadap RKS serta penyesuaian terhadap kebutuhan dan perubahan yang terjadi di lingkungan sekolah menjadi langkah penting untuk memastikan efektivitas dan relevansi RKS dalam jangka panjang.

RKS yang sudah berisikan anggaran kemudian disebut dengan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) untuk kemudian dimasukkan ke dalam ARKAS. Penggunaan ARKAS yang diwajibkan oleh Pemerintah demi tercapainya pengelolaan dana BOS sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan akan menarik untuk diteliti tentang sejauh mana ARKAS dapat berpengaruh terhadap tercapainya masing-masing prinsip tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba

melakukan penelitian bagaimana pengaruh ARKAS terhadap efektivitas dan akuntabilitas penggunaan dana BOS. Pemilihan kedua aspek ini dilakukan untuk membatasi masalah penelitian yakni pada aspek di mana ARKAS dapat memberikan pengaruh langsung dalam pengelolaan dana BOS.

Aplikasi ARKAS yang terus mengalami berbagai perkembangan fitur juga menyebabkan penggunaannya belum berlangsung secara optimal (Wulandari, 2022). Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah menyediakan website khusus yang berisikan informasi terkait ARKAS seperti fitur yang baru ditambahkan, panduan penggunaan dan panduan mengatasi kendala teknis agar tim pengelola BOS di sekolah selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai ARKAS. Dengan demikian tim pengelola BOS di sekolah dapat dengan mudah mempelajari fitur-fitur yang baru dikembangkan tersebut dan dapat mencari referensi penyelesaian ketika mereka mengalami kendala teknis.

Beberapa penelitian relevan terkait efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di sekolah antara lain dilakukan oleh Ammar dan Bustamam (2019), yang menemukan bahwa pengelolaan dana BOS di sekolah negeri dan swasta yang diteliti sudah berjalan secara efektif dan akuntabel. Berbeda dengan penelitian Hakim & Suhendar (2020), yang menemukan adanya perbedaan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS, di mana sekolah negeri cenderung mempunyai pengelolaan dana BOS yang lebih efektif dan akuntabel dibandingkan sekolah swasta. Perbedaan temuan antara masing-masing tempat penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS dipengaruhi oleh kondisi dari suatu lembaga pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah mengharapkan kewajiban penggunaan ARKAS sebagai sistem pengelolaan yang seragam di seluruh satuan pendidikan mampu menjadi sarana berbagai pihak yang terlibat untuk berkoordinasi dengan baik (Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah, 2022), sehingga proses pengelolaan menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa penelitian lain juga menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara positif terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS di satuan pendidikan (Nupus, 2021; Tanjung, Masnila, & Mubarok, 2022; Yusra, Yunita, Nurhasanah, & Arliansyah, 2021). Pengaruh ARKAS terhadap efektivitas dan akuntabilitas

pengelolaan dana BOS menjadi kebaruan dalam penelitian ini, dikarenakan berbagai penelitian sebelumnya dilakukan ketika pengelolaan dana BOS masih dilakukan secara manual sehingga masih terdapat perbedaan-perbedaan terhadap pemahaman pengelolaan, dibandingkan ARKAS yang mengarahkan kepada pemahaman pengelolaan yang sifatnya seragam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, berikut merupakan rumusan masalah penelitian yang akan dikaji:

1. Bagaimana penggunaan ARKAS dalam pengelolaan dana BOS di SMA dan SMK kota Lhokseumawe.?
2. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SMA dan SMK kota Lhokseumawe.?
3. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana BOS di SMA dan SMK kota Lhokseumawe.?
4. Bagaimana pengaruh ARKAS terhadap akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SMA dan SMK kota Lhokseumawe.?
5. Bagaimana pengaruh ARKAS terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS di SMA dan SMK kota Lhokseumawe.?
6. Bagaimana pengaruh ARKAS dan akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS di SMA dan SMK kota Lhokseumawe.?
7. Bagaimanakah pengaruh ARKAS terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS di SMA dan SMK Kota Lhokseumawe, dengan mempertimbangkan peran akuntabilitas sebagai mediator.?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui gambaran bagaimana penggunaan sistem informasi manajemen ARKAS dalam pengelolaan dana BOS di SMA Negeri dalam wilayah kota Lhokseumawe. Adapun tujuan khususnya adalah sebagai berikut:

1. Terdeskripsikannya penggunaan ARKAS dalam pengelolaan dana BOS di SMA dan SMK kota Lhokseumawe.

2. Terdeskripsikannya akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SMA dan SMK kota Lhokseumawe.
3. Terdeskripsikannya efektivitas pengelolaan dana BOS di SMA dan SMK kota Lhokseumawe.
4. Teranalisisnya pengaruh ARKAS terhadap akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SMA dan SMK kota Lhokseumawe.
5. Teranalisisnya pengaruh ARKAS terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS di SMA dan SMK kota Lhokseumawe.
6. Teranalisisnya pengaruh ARKAS dan akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS di SMA dan SMK kota Lhokseumawe.
7. Teranalisisnya pengaruh ARKAS terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS di SMA dan SMK Kota Lhokseumawe, dengan mempertimbangkan peran akuntabilitas sebagai mediator.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi pada literatur akademis mengenai sistem informasi manajemen, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di SMA dan SMK.
2. Menghasilkan pemahaman yang lebih baik mengenai peran sistem informasi manajemen ARKAS dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana BOS.
3. Menyajikan kerangka konseptual yang dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut tentang pengembangan dan implementasi sistem informasi manajemen dalam sektor pendidikan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Menyediakan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sekolah, dan pengelola dana BOS, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana melalui sistem informasi manajemen ARKAS.

2. Membantu sekolah, terutama SMA dan SMK, dalam mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul selama proses implementasi sistem informasi manajemen ARKAS.
3. Memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait untuk mengembangkan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung pengelolaan dana BOS dan penggunaan sistem informasi manajemen ARKAS.
4. Mendorong kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan pihak lain yang terlibat dalam proses pengelolaan dana BOS untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Tesis ini akan disusun sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), yang mencakup judul penelitian, lembar pengesahan, daftar isi, daftar grafik, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar pustaka, serta lima bab inti dan lampiran. Kelima bab inti akan membahas aspek-aspek berikut:

1. Bab I akan mencakup pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan dasar pemikiran penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur organisasi penelitian.
2. Bab II akan menyajikan konsep dan teori serta hasil penelitian terkait yang mendukung topik yang diteliti. Konsep dan kerangka teori yang akan diuraikan dalam bab ini berkaitan dengan kajian dana BOS dalam administrasi pendidikan, sistem informasi ARKAS, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan dana BOS. Bab ini juga membahas kerangka penelitian dan penelitian sebelumnya yang relevan.
3. Bab III akan menguraikan desain, metode, dan pendekatan penelitian, serta lokasi dan subyek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang akan digunakan.
4. Bab IV akan menyampaikan hasil penelitian, termasuk proses dan hasil analisis statistik, serta penjabaran data dan angka hasil penelitian secara spesifik dan umum.

5. Bab V akan mengevaluasi kesimpulan penelitian, meliputi interpretasi data dalam bentuk narasi deskriptif, implikasi penelitian terkait penggunaan sistem informasi ARKAS dalam pengelolaan dana BOS bagi pihak-pihak yang terlibat, serta bagi peneliti yang akan melanjutkan penelitian pada topik serupa.